



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

Nomor : 470/966/DPPKBKPS.4/X/2019
Lampiran :
Perihal : **Hasil Monev Pelayanan
Administrasi Kependudukan**

Padang, 4 Oktober 2019

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Padang

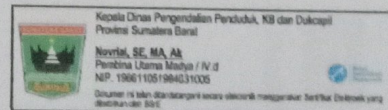
di-

Padang

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi DPPKBKPS Prov.Sumbar ke Dinas Dukcapil Kota Padang pada tanggal 3 Oktober 2019 terkait pelayanan yang dilakukan, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dari 4 (empat) petugas verifikator yang disediakan hanya 2 (dua) orang petugas yang melakukan pelayanan, sehingga terjadi penumpukan antrian masyarakat yang akan dilayani. Agar dilakukan evaluasi terhadap kondisi-kondisi tersebut.
2. Untuk loket verifikator disarankan ada pejabat eselon IV terkait untuk melakukan verifikasi teknis kelengkapan dokumen yang diberikan oleh masyarakat dan membubuhkan paraf untuk tiap dokumen yang sudah diverifikasi agar dilakukan pengentrian dan penerbitan dokumen oleh operator.
3. Untuk meja layanan terutama di meja verifikator disarankan dibuat representatif/senyaman mungkin (kaca pembatas petugas dengan masyarakat dilepas) sehingga komunikasi antara petugas dengan masyarakat dapat sampai secara maksimal.
4. Salah seorang ADB setiap hari diposisikan dibelakang meja operator untuk mengawasi, dan menangani permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan oleh operator.
5. Untuk memudahkan, agar membuat aplikasi nomor antrian dan jika diperlukan lakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan aplikasi antrian.
6. Aplikasi monev segera dijalankan, untuk Bidang PIAK agar melakukan instalasi *auto report* dan memastikan aplikasi sudah jalan oleh masing-masing bidang, dan setiap bidang (Dafduk, Capil dan Sekretariat) melakukan entrian manual setiap harinya pada menu aplikasi monev. Disarankan agar ada SK atau Surat Tugas Kepala Dinas untuk penanggungjawab aplikasi monev.
7. Saran alur pelayanan terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan)

ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

